



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : LLDIKTI WILAYAH III

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELIH ERMAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 648308

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 123.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG-TX MT / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 5 BP / SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 23.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 41.533.269

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.637.533.269

**III. HUTANG** Rp. 582.275.160

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.055.258.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.